

CASCADING DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR

TUJUAN : MENGURANGI ANGKA PENGANGGURAN

Sasaran 1 : Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja
1.1. Tenaga Kerja Yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi

Sasaran 2 : Meningkatkan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
2.1. Pencari Kerja Yang Dapat Meningkat dan Tertercapainya Wajahnya

Sasaran 3 : Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial
3.1. Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Dengan Terlaksananya Penerapan Sarana Hubungan Industrial di Perusahaan

SEKRETARIS		KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN PELATIHAN				KEPALA BIDANG PERLUASAN KESEMPATAN KERJA				KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL							
<p>Sasaran 1 : Meningkatkan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Indikator : tersedianya dokumen sarana prasarana dan kepegawaian</p> <p>Sasaran 2 : Meningkatkan Kinerja Perencanaan dan Keuangan Indikator : tersedianya dokumen Perencanaan dan Keuangan</p>		<p>Sasaran : Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja Indikator : 1. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Bebas Kompetensi 2. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Keirausahaan</p>				<p>Sasaran : Meningkatkan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Indikator : 1. Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang ditempatkan</p>				<p>Sasaran : Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial Indikator : 1. Besaran Kasus yang Disediakan dengan Perjanjian Bersama (PB) 2. Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan</p>							
KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	PENGANTAR KERJA AHLI MUDA	ANALIS BAHAN PENGUJIAN DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PELATIHAN	ANALIS BAHAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS	PENGADMINISTRASI UMUM	PENGANTAR KERJA AHLI MUDA	PENGANTAR KERJA AHLI MUDA	ANALIS BAHAN PENDEKALAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING	ANALIS BAHAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI MUDA	PENYUSUNAN BAHAN PROSES PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN KETEGANGAN	ANALIS PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA	ANALIS BAHAN PENGUPAHAN				
<p>Sasaran 1 : Meningkatkan pengelolaan administrasi aset Indikator : tersedianya laporan administrasi sarana prasarana</p> <p>Sasaran 2 : Meningkatkan pengelolaan administrasi umum Indikator : tersedianya dokumen administrasi ketatausahaan</p> <p>Sasaran 3 : Meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian Indikator : tersedianya laporan pemeliharaan administrasi kepegawaian</p>		<p>Sasaran 1 : Meningkatkan Kinerja Perencanaan Indikator : 1. Jumlah Laporan Perencanaan 2. Jumlah Perencanaan jenis dan jabatan (rangkap pekerjaan) 3. Jumlah Perencanaan dan Pemahaman Tentang Produktivitas Tenaga Kerja</p> <p>Sasaran 2 : Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja Indikator : 1. Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Keterampilan 2. Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pemahaman Tentang Produktivitas Perusahaan 3. Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Bimbingan Konsultasi Pengukuran</p>				<p>Sasaran 1 : Meningkatkan Informasi Pasar Kerja Indikator : 1. Jumlah Laporan Informasi Pasar Kerja 2. Jumlah Laporan Konsultasi kepada Pencari Kerja</p> <p>Sasaran 2 : Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja Indikator : 1. Jumlah Laporan Penyaluran yang Mendapat Layanan Perantara Kerja 2. Jumlah Laporan Pencari Kerja yang Mendapat Informasi Pasar Kerja</p>				<p>Sasaran : Meningkatkan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PWI dan Purna Penempatan) di Kabupaten/Kota Indikator : 1. Terlaksananya Sinkronisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan MTA dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota 2. Terlaksananya Monitoring Perusahaan Pemantauan Pekerja Migran Indonesia (PWI) 3. Terlaksananya Pengumpulan dan Pengolahan Data Penempatan Tenaga Kerja Asing 4. Jumlah Laporan Verifikasi Terhadap Kelengkapan Dokumen Tenaga Kerja Asing (TKA) yang Bekerja di Perusahaan untuk Selanjutnya di Validasi</p>				<p>Sasaran : Meningkatkan Perlindungan Hubungan Industrial Indikator : 1. Jumlah Laporan Pembinaan Hubungan Industrial 2. Jumlah Dokumen Penyerahan Penilaian Pembinaan Hubungan Industrial 3. Jumlah administrasi pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit 4. Terlaksananya verifikasi Terhadap Kelengkapan Dokumen Kesepakatan Bersama Perjanjian Penempatan PMI 5. Jumlah administrasi pencatatan Sistem Pelayaran Sarana Hubungan Industrial</p>			
<p>PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA Indikator : 1. Jumlah Laporan Gaj ASN dan Non ASN 2. Jumlah Laporan E-kinerja 3. Jumlah Laporan BPJS 4. Jumlah Laporan SPP dan SPM</p> <p>Sasaran 1 : Peningkatan Pengadministrasian Sarana dan Prasarana Indikator : 1. Jumlah Laporan Aset Milik Daerah 2. Jumlah Laporan Pemeliharaan Gedung 3. Jumlah Laporan Kandang Deras 4. Jumlah Laporan Alergik Kantor</p>		<p>PEMERIKSA PELAPORAN DAN TRANSAKSI KEUANGAN Indikator : 1. Jumlah Laporan Pemeliharaan Laporan Transaksi Keuangan</p>				<p>Sasaran 4 : Meningkatkan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Indikator : 1. Jumlah Laporan Kelengkapan Bursa Kerja Khusus 2. Peningkatan Kualitas Kerja 3. Peningkatan Fasilitas Layanan Disabilitas yang Tersedia 4. Peningkatan Kemampuan Disabilitas</p>				<p>Sasaran 3 : Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja berdasarkan sarana Hubungan Industrial Indikator : 1. Jumlah Penyelesaian Hubungan Industrial yang diselesaikan</p>							
<p>ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN Sasaran : Tersedianya Laporan Transaksi Keuangan Indikator : 1. Jumlah Laporan Transaksi Keuangan 2. Jumlah Laporan Administrasi Bukti Penytoran, Perencanaan, dan Pengelolaan Uang di dalam Buku Kas Umum 3. Jumlah Laporan Keadan 4. Kas, Kredit dan Realisasi Anggaran Rutin</p>		<p>PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN Sasaran : Tersedianya Bahan Perencanaan Indikator : 1. Jumlah Dokumen Perencanaan 2. Jumlah Laporan Kinerja Instansi</p>				<p>Sasaran 4 : Meningkatkan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Indikator : 1. Jumlah Calon Angkatan Kerja atau Siswa-Siswi SMA/SMK yang Tersedia 2. Peningkatan Kualitas Kerja 3. Peningkatan Fasilitas Layanan Disabilitas</p>				<p>Sasaran 3 : Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial Indikator : 1. Jumlah Dokumen Analisis Perindungan Dan Pemberdayaan Tenaga Kerja 2. Jumlah pelayanan administrasi pelaksanaan kegiatan serta kebijakan teknis perlindungan dan pemberdayaan Tenaga Kerja 3. Jumlah fasilitas pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis perlindungan dan pemberdayaan Tenaga Kerja 4. Jumlah administrasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial</p>							